

PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI BERBASIS GENDER DI DESA TAKKALASI KABUPATEN SIDRAP

Sakaruddin Mandjarreki^{1*} Andi Muhammad Fadly²

^{1,2}. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

sakaruddinmandjarreki837@gmail.com (Penulis) andi.fadli@uin-alauddin.ac.id

*(082188089067)

ABSTRAK

The presence of women presents a new perspective in implementing strategies for implementing the gender-based national independent community empowerment (PNPM) program. Therefore, the research aims to find out how gender-based strategies are in implementing the national independent community empowerment program (PNPM) in Takkalasi Village, Sidrap Regency, South Sulawesi Province. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach. The resources in this research consist of primary data and secondary data. To maintain the consistency of the methodology of this research, data collection techniques were also used following the constructivist tradition starting from the observation, interview, and documentation stages. After the data is collected, the next step is to carry out data analysis by following the tradition of qualitative research the conclusion of this research is One form of implementing the strategy for implementing the National Independent Community Empowerment Program (PNPM) based on gender in Takkalasi Village, Sidrap Regency, starting from building gender awareness, organizing community training, ensuring access and space for participation, women's economic empowerment and finally building a culture of women's leadership.

Keywords:

National Program,
Independent Community
Empowerment, Gender
Based

ABSTRAK

Keberadaan perempuan menghadirkan perspektif baru dalam menerapkan strategi pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) yang berbasis gender. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi berbasis gender dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) di Desa Takkalasi Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi kemudian Sumber daya dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk menjaga konsistensi metodologi dari penelitian ini maka teknik penumpulan data juga yang digunakan mengikuti tradisi konstruktivis yang dimulai dari tahap observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kata Kunci:

Program Nasional,
Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri,
Berbasis Gender

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan mengikuti tradisi dalam penelitian kualitatif dan kesimpulan dari penelitian ini adalah Salah satu bentuk penerapan strategi pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) yang berbasis gender di Desa Takkalasi Kabupaten Sidrap dalam dimulai dari membangun kesadaran gender, menyelenggarakan pelatihan masyarakat, menjamin akses dan ruang untuk berpartisipasi, pemberdayaan ekonomi perempuan dan terakhir adalah membangun kultur kepemimpinan perempuan.

Article History

Submitted:
07 September 2023

Revised:
16 September 2023

Accepted:
23 September 2023

Citation (APA Style) : Mandjarreki, S., & Andi Muhammad Fadly. (2023). PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI BERBASIS GENDER DI DESA TAKKALASI KABUPATEN SIDRAP. *ISTIQRRA*, 11(2), 223 - 242. <https://doi.org/10.24239/ist.v11i2.2306>

This is an open-access article under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).



PENDAHULUAN

Sejak dekade silam hingga saat ini belum ada penyepakatan secara formal dan kondusif khususnya perspektif mengenai kemiskinan, persoalan tersebut terletak pada konsep kemiskinan yang didefinisikan dari berbagai macam sudut pandang, mulai dari sudut pandang yang sifatnya spekulatif hingga ke dalam perspektif keilmuan tertentu. Belum lagi konsep kemiskinan yang diperhadapkan pada sebuah keruwetan intelektual dan kekakuan secara idealisme tentang penamaan orang miskin, siapakah yang sebenarnya orang miskin. Penyebutan tersebut, kemudian menghadirkan klasifikasi dari berbagai pihak atau lembaga.

Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Muttaqih (Muttaqin, 2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu lembaga yang menaruh perhatian besar pada kemiskinan adalah Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yang terdiri dari kebutuhan konsumsi dan non konsumsi, dalam ukuran BPS salah satu kebutuhan konsumsi ialah makanan yang memiliki takaran 2.100 kilo kalori per hari, sementara kebutuhan non konsumsi ialah kebutuhan seseorang terhadap pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain sebagainya. Selain BPS, beliau juga menyebutkan salah satu lembaga internasional yang menaruh perhatian penuh terhadap kemiskian ialah Bank Dunia, namun dalam kesempatan yang sama beliau juga

menambahkan bahwa indikator kemiskinan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga tersebut, berpotensi membawa implikasi yang dapat menggeser upaya yang sifatnya strategis kepada komoditas politik pragmatis, sehingga masing-masing dapat mengklain keakuratan angka kemiskinan sekaligus representatif untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan.

Sementara menurut Heru Nugroho (Nugroho, 2001) kemiskinan tidak selamanya dilihat dalam perspektif ekonomi yang dapat diukur secara kuantitatif seperti indikator yang dimiliki oleh BPS yaitu konsumsi kalori atau belanja yang dapat dikonversi kedalam bentuk rupiah. Namun ada juga kemiskinan dalam perspektif non ekonomi atau yang biasa disebut dengan kesejahteraan sosial yang intinya tidak hanya berada pada aspek angka-angka yang merepresentasi kemiskinan tetapi pada aspek lain yang juga menjadi perhatian penting yaitu gejala-gejala yang dapat ditimbulkan dari kemiskinan itu sendiri.

Inti dari kedua penjelasan di atas, menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah dan menurut Chambers (Chambers, 1987) masalah kemiskinan berasal dari apa yang disebutnya sebagai *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan yang memiliki lima unsur penting, yang pertama kemiskinan itu sendiri, kedua kelemahan fisik, ketiga keterasingan atau kadar isolasi, keempat kerentanan dan kelima adalah ketidakberdayaan. Kelima unsur tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemiskinan memiliki potensi yang sangat berbahaya dalam masyarakat. Pernyataan tersebut sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa “kemiskinan itu dekat dengan kekufuran”. Menurut Muhammad Ishom (Ishom, 2018) hadist tersebut dapat dimaknai sebagai salah satu kondisi yang perlu diwaspadai, sebab kemiskinan dapat menggoda seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, contohnya seorang ibu rumah tangga terpaksa menjual diri demi menghidupi anak-anaknya.

Salah satu cara membantu masyarakat menghindari perangkap kemiskinan, dibutuhkan sebuah strategi berbasis gender untuk menjamin terlaksananya program pemberdayaan masyarakat yang telah dibuat oleh Negara melalui pemerintah yaitu Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Menurut Putu Bayu Putra Mahendra dkk (Mahendra, 2017) penanggulangan kemiskinan yang diterapkan oleh Pemerintah memiliki sumber dana dalam

bentuk BLM PNPM Mandiri dan dikelola dalam bentuk pendampingan (*cost-sharing*) antara pusat dengan daerah berdasarkan kapasitas fiskal masing-masing kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2006 tanggal 30 Agustus 2006. Sesuai dengan surat dari Departemen Pekerjaan Umum Nomor PR.01.03-DC/664 tanggal 30 Nopember 2009 tentang lokasi dan alokasi PNPM Mandiri.

Dari penjelasan tersebut di atas, kesimpulan yang dapat diambil ialah strategi penerapan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah menempatkan masyarakat secara produktif dengan memberikan kesempatan untuk terlibat secara penuh. Artinya masyarakat miskin memiliki surplus potensi yang dapat digali untuk mengakselerasi keberdayaannya sekaligus memutus rantai ketergantungan yang dominan kepada pihak luar. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, yang menjadi *novelty* dalam penelitian ini adalah strategi berbasis gender yang diterapkan dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri khususnya di daerah Takkalasi Kabupaten Sidrap. Hal ini, menjadi sangat penting sebab efektifnya pelaksanaan program tersebut jika pemerintah dan masyarakat memiliki persepsi yang sama.

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami konsep yang dibangun dalam penelitian ini, peneliti memulainya dengan menjelaskan beberapa istilah penting yang sifatnya operasional salah satunya adalah strategi berbasis gender. Strategi berbasis gender merupakan pendekatan yang berfokus pada orientasi hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mosse (Mosse, 2002) yang menyebutkan salah satu strategi berbasis gender adalah pendekatan *Gender and Development* yang berfokus pada hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan yang dimulai dari ketahanan keluarga atau rumah tangga dalam bentuk pemberdayaan sehingga kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan dapat terdistribusi secara adil.

Istilah pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebiato (Mardikanto & Soebiato, 2012) merupakan konsep pembangunan pada aspek ekonomi yang merangkul nilai-nilai sosial khususnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Pernyataan tersebut juga diakui oleh Isma (Isma, 2022) dan (Fatmawati, 2022) yang mengatakan bahwa istilah pemberdayaan

merupakan strategi yang berbasis gender dalam meningkatkan pembangunan yang berbasis ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber daya dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan wawancara dan observasi dengan dibantu oleh alat bantu seperti alat perekam suara, buku catatan dan kamera. Kemudian data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Untuk menjaga konsistensi metodologi dari penelitian ini maka teknik penumpulan data juga yang digunakan mengikuti tradisi pendekatan konstruktivis yang dimulai dari tahap observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan mengikuti tradisi dalam penelitian kualitatif yaitu analisis induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dari penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan kenyataan di lapangan yang peneliti temukan menunjukkan bahwa strategi berbasis gender dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri di Kabupaten Sidrap adalah membangun kesadaran gender, menyelenggarakan pelatihan masyarakat, menjamin akses dan ruang untuk berpartisipasi, pemberdayaan ekonomi perempuan dan terakhir adalah membangun kultur kepemimpinan perempuan. Penerapan strategi tersebut tidak lepas dari sistem pengetahuan yang merupakan ciri khusus yang dimiliki individu dalam masyarakat untuk merespon perilaku individu yang terjadi di lingkungan. Dengan kata lain sistem pengetahuan salah satu dari produk interaksi sosial dan menurut Alex Sobur (Sobur, 2017) produk interaksi sosial hanya dapat dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa dari negosiasi tersebut manusia dapat memberikan warna pada objek fisik di lingkungan, tindakan atau peristiwa.

Pada aspek pertama yaitu membangun kesadaran gender dimulai dari pemberian pemahaman masyarakat tentang isu-isu gender dan pentingnya pengarusutamaan gender dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui kampanye kesadaran, dan pendidikan masyarakat, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan dapat dikurangi, dan dukungan masyarakat untuk kesetaraan gender dapat ditingkatkan. Dalam konteks penelitian ini, peningkatan kesadaran dilakukan melalui proses sosialisasi program secara intensif dan dengan waktu yang cukup lama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi program tidak hanya di awal, tetapi sosialisasi

berjalan dan berbanding lurus dengan implementasi semua tahapan program di tingkat masyarakat, yakni dari fase persiapan dan perencanaan hingga di fase pemanfaatan hasil-hasil program. Cara ini dipandang sangat strategis dalam upaya mempersuasi, mengadvokasi, dan melibatkan perempuan di semua tahapan program sebagaimana diungkapkan oleh fasilitator berikut ini: “Hal pertama yang harus dilakukan untuk membangun kesadaran gender masyarakat, khususnya perempuan untuk terlibat program adalah dengan mengenalkan program secara komprehensif dan berulang-ulang. Kami berharap bahwa dengan pengenalan program melalui sosialisasi dapat membangun kesadaran masyarakat secara luas untuk berpartisipasi. Hal pokok yang disosialisasi adalah bahwa program ini untuk kepentingan bersama semua warga tanpa mengenal jenis kelamin dan kedudukan sosial. Semua individu mendapatkan akses dan peran yang setara untuk terlibat dalam mendukung program dan mensukseskannya”.

Fasilitator menilai bahwa cara efektif untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan terlibat secara luas dalam program adalah dengan sosialisasi secara intensif dengan durasi waktu yang lama. Masyarakat luas, khususnya kaum perempuan menyerap informasi langsung, benar, menyeluruh, dan utuh perihal esensi dan teknis program serta keharusan keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraannya secara signifikan melalui ragam peran.

Sosialisasi memungkinkan tumbuhnya kesadaran gender bagi perempuan bahwa perempuan memiliki akses, peran, dan kepentingan yang setara dan setaraf dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan program pemberdayaan di tingkat masyarakat. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa secara umum sosialisasi dilakukan secara non formal, meskipun beberapa di antaranya dilakukan secara formal. Sosialisasi formal dilakukan di tingkat desa pada fase permulaan sebelum program direalisasikan. Kegiatan sosialisasi setelahnya lebih bersifat non formal dengan mendatangi kelompok-kelompok warga di masyarakat. Fasilitator menjelaskannya sebagai berikut: “Salah satu tugas pokok fasilitator atau pendamping adalah menyampaikan amanat program kepada segenap khalayak atau warga di desa, tanpa kecuali agar program ini mendapat dukungan secara meluas. Pola atau format sosialisasi kami laksanakan dalam dua jenis, yakni formal dan non formal. Pengalaman yang ada bahwa sosialisasi dengan pola non formal jauh lebih efektif dibandingkan dengan pola yang formal. Pola non formal nampak lebih santai, bersahabat, dan memiliki daya gugah yang lebih baik. Banyak perempuan yang justru tertarik dan berperan penting dalam program dengan pola non formal karena masyarakat lebih mudah mengerti dan lebih percaya diri bertanya tentang banyak hal tentang program”.

Signifikansi jumlah perempuan yang terlibat atau berpartisipasi dalam program berhubungkait dengan dari cara memfasilitasi mereka dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan cara menyampaikannya. Informasi yang mudah diserap dan dicerna akan tampaknya berdampak positif terhadap tumbuhnya kesadaran gender secara kolektif untuk melibatkan diri dalam penyelenggaraan program. Salah satu prinsip program yang memegang peran penting mendorong keterlibatan perempuan secara massif dalam program adalah prinsip inklusi atau keterbukaan akses untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi. Prinsip ini secara potensial menciptakan perspektif baru bagi perempuan dalam bagaimana memosisikan dirinya secara kalkulatif dalam pembangunan masyarakat, yang secara spesifik juga mencakup dirinya.

Fasilitator menjelaskan bahwa umumnya perempuan yang terlibat karena memiliki kesadaran gender setelah mereka mendapatkan sosialisasi secara intensif tentang program, khususnya pentingnya partisipasi yang bersifat konsisten dan menerus. Hasil wawancaranya sebagai berikut: “Umumnya perempuan yang terlibat dengan berbagai peran karena sesungguhnya mereka juga sadar bahwa partisipasi yang diberikannya merupakan bukti tanggung jawab warga untuk membuat program berjalan dengan baik sehingga berdampak baik pula terhadap masyarakat. Partisipasi yang ditunjukkan mengekspresikan kesadaran gender yang baik karena didasari oleh pemahaman yang baik pula akan tanggung jawab warga terhadap pelaksanaan program”.

Dukungan konkrit yang diberikan fasilitator, dalam hal ini adalah diseminasi konsisten untuk terbangunnya kesadaran gender bagi perempuan adalah manifestasi dari tugas mendasarnya sebagai apa yang disebut oleh Safei dkk (Safei et al., 2020) sebagai *as rescue*, *as catalyst*, *as ally*, dan *as modernizer*. Dari keseluruhan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara sosialisasi intensif dengan kesadaran gender. Semakin intensif sosialisasi dilakukan semakin berpengaruh pula terhadap meningkatnya kesadaran gender bagi perempuan untuk terlibat di dalam penyelenggaraan program. Baik Knof dan WuDunn dalam Zinn (Zinn, 2011) maupun Safa (Safa, 2007) memiliki perspektif yang selaras perihal pentingnya membangun kesadaran perempuan untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang potensial memberdayakan diri dan kelompoknya. Jadi sosialisasi dalam konteks tertentu telah menjelma menjadi instrumen pembangkit kesadaran kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai konteks kehidupan. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi merupakan elemen dasar yang dapat menentukan arah keberhasilan program di tengah masyarakat. Sosialisasi yang baik

memberi peluang terhadap tingginya partisipasi warga dalam program akibat kesadaran gender perempuan yang semakin membaik pula.

Selanjutnya pada aspek penyelenggaraan pelatihan masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan memberikan perhatian secara serius terhadap peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui rangkaian pelatihan. Pelatihan masyarakat dimaksudkan untuk memberikan kompetensi konkrit kepada masyarakat agar dapat memberikan peran secara maksimal dalam penyelenggaraan program. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan tersebut melibatkan banyak perempuan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dari perempuan ibu rumah tangga hingga perempuan kader desa/kelurahan. Pelatihan dimaksudkan sebagai instrumen atau wadah yang memungkinkan banyak perempuan dapat terlibat secara langsung dalam program. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, pelatihan-pelatihan masyarakat tersebut diorientasikan untuk; pertama memberikan pemahaman substansi tentang program, kedua memberikan kemampuan teknis untuk memudahkan dalam melakukan berbagai tahapan program, tiga memberikan pengetahuan bisnis dan kemampuan teknis pembukuan dalam mengelola usaha kelompok. Dalam konteks ini, fasilitator menjelaskan sebagai berikut: “PNPM Mandiri Perkotaan memfasilitasi masyarakat untuk mengikuti berbagai jenis pelatihan. Selama pelaksanaan program, ada sejumlah paket-paket pelatihan yang telah dilakukan, antara lain; pelatihan relawan, pelatihan anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), pelatihan Unit Pengelola Ekonomi, Unit Pengelola Sosial (UPS), dan Unit Pengelola Lingkungan (UPL). Keseluruhan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal pengetahuan dan kemampuan teknis agar keseluruhannya mampu mengambil peran secara memadai dalam program”.

Mencermati hasil wawancara di atas tampak bahwa program menyiapkan sejumlah paket pelatihan yang diperuntukkan bagi masyarakat sebagai warga program, sebagai bagian dari upaya program dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Salah satu intervensi penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kapasitas masyarakat agar masyarakat secara kualitatif dapat melakukan upaya-upaya tertentu yang mengarah pada perbaikan kondisi kehidupannya. Kapasitas yang memadai tentu saja dapat berkontribusi secara maksimal dalam mendorong akselerasi penyelenggaraan program.

Secara umum, peserta pelatihan adalah perempuan dengan berbagai latar belakang usia, pendidikan, dan kelas sosial. Pelibatan banyak perempuan dalam paket-paket pelatihan masyarakat merupakan manifestasi pengarusutamaan gender dalam program pemberdayaan masyarakat. Pelibatan perempuan juga mencerminkan inklusivitas program yang didasarkan

pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Salah satu alasan mendasar di balik upaya berkesungguhan mendorong perempuan untuk mengikuti paket-paket pelatihan masyarakat adalah untuk memberinya ruang partisipasi sekaligus membangun kompetensi personalnya agar mampu memberikan peran signifikan dalam pelaksanaan program sebagaimana dijelaskan oleh informan sebagai berikut: “Semua pihak, khususnya penyelenggara program berharap agar perempuan dapat menunjukkan kiprahnya dalam program. Kami berkeyakinan bahwa jika perempuan memiliki kapasitas yang baik, maka sudah pasti mampu berperan baik pula dalam program. Nilai kesetaraan gender merupakan landasan kuat bagi program untuk mendorong keterlibatan perempuan secara massif dan signifikan dalam implementasi program. Fasilitator sangat penting *diback up* oleh warga, khususnya perempuan untuk melakukan berbagai fasilitasi di tingkat warga dan di tingkat pemerintahan desa agar penyelenggaraan program dapat berjalan dengan baik”.

Substansi atau esensi dari pelatihan-pelatihan masyarakat adalah memberikan daya atau kekuatan bagi peserta, khususnya perempuan agar memampukannya melakukan kiprah dan memberikan kontribusi terbaik dalam penyelenggaraan program. Peran yang diberikan kepada perempuan harus berbanding lurus dengan kapasitas yang dimilikinya agar perannya dapat dikonkritkan dengan sebagaimana mestinya. Di Unit Pengelola Keuangan (UPK) misalnya, yang semua anggotanya adalah perempuan, bertugas melakukan pembukuan transaksi keuangan yang rumit. Untuk dapat melakukan tugas ini, maka diperlukan kompetensi yang sesuai dengan deskripsi tugasnya. Pelatihan masyarakat, khususnya pelatihan bagi UPK telah membantu dalam memberikan pengetahuan dan kemampuan teknis untuk melakukan tugasnya sebagai pembuku transaksi keuangan yang dikelola masyarakat melalui UPK. Dalam kaitan ini, informan menjelaskannya sebagai berikut: “Menjadi tenaga di UPK tidak mudah karena harus memiliki kompetensi teknis dalam hal pembukuan. Jika tidak salah, jumlah buku yang harus dikuasai pengisiannya oleh UPK ada sekira 9 buku yang saling berhubungan. Tentu tidak mudah mengoperasionalsasinya jika tidak diawali dengan pelatihan tentang bagaimana melakukan itu semua. Fasilitator yang bersumber sebagai narasumber adalah seorang sarjana ekonomi yang berlatar belakang sebagai akuntan”.

Dari pernyataan informan di atas, secara eksplisit menunjukkan bahwa pelatihan masyarakat telah berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas warga agar mampu berkontribusi riil dan signifikan dalam program. Keterlibatan perempuan dalam program, disamping sebagai amanat global juga merupakan suatu keniscayaan yang disandarkan pada kebutuhan dan

kepentingan masyarakat untuk memberi peran secara luas terhadap pelaksanaan program yang berdampak secara langsung dalam kehidupannya.

Aspek selanjutnya adalah aspek menjamin akses dan ruang untuk berpartisipasi. Penumbuhan kesadaran kolektif masyarakat menyangkut pentingnya menjadi bagian dari program dan penyelenggaraan pelatihan masyarakat yang terbuka secara umum, khususnya kelompok perempuan merupakan dua aspek yang secara fungsional dan kontributif mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara meluas dalam pelaksanaan program. Pemberdayaan tanpa partisipasi adalah proyek tiranik yang mendorong masyarakat jauh ke pinggir dan nirpartisipasi. Masyarakat dalam perspektif pemberdayaan adalah subyek pembangunan yang sangat vital dan strategis. Dalam konteks ini, Soetomo (Soetomo, 2014) memberikan penegasan bahwa dalam program-program pemberdayaan masyarakat, masyarakat didorong berpartisipasi dalam berbagai tahapannya yang dimulai dari pengambilan keputusan hingga pada pemanfaatan hasil-hasil program agar masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut.

Partisipasi masyarakat, khususnya perempuan dalam program meliputi semua tahapan penyelenggaraan program di masyarakat, yakni mulai dari fase persiapan dan perencanaan program, pelaksanaan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi program, hingga pada pemanfaatan hasil-hasil program sebagaimana diungkapkan oleh informan sebagai berikut: "Program ini mendorong partisipasi masyarakat, khususnya perempuan di semua tahapan, dari awal hingga akhir, atau dari tahap perencanaan hingga di tahap pemanfaatan hasil-hasil program. Ini dimaksudkan untuk menjamin dan memastikan bahwa isu pengarusutamaan gender benar-benar terejawantah secara konkrit dalam pelaksanaan program pemberdayaan, khususnya di PNPM Mandiri Perkotaan ini".

Di fase persiapan dan perencanaan program, partisipasi kelompok perempuan lebih ditunjukkan melalui kehadiran sebagai peserta sosialisasi program. Peran yang diberikan berupa peran-peran yang bersifat instrumental dan belum substansial, misalnya membantu mengedarkan undangan sosialisasi, membantu mengatur dan menyiapkan tempat kegiatan sosialisasi, dan kegiatan-kegiatan kecil lainnya. Di fase pelaksanaan dan pengendalian program, partisipasi perempuan meningkat ke level yang lebih substansial dengan membantu proses fasilitasi program hingga mengambil peran sentral sebagai bagian dari program, misalnya dengan menjadi anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) serta mengisi sejumlah posisi di unit-unit kelengkapan organisasi LKM, yakni di Unit Pengelola Sosial (UPS), Unit Pengelola Keuangan (UPK), dan Unit Pengelola Lingkungan (UPL).

Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan program tetap berdasarkan pada aturan main yang ada, maka masyarakat, dalam hal ini kelompok perempuan, juga berpartisipasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi program. Bentuk partisipasinya antara lain mengedarkan angket ke masyarakat perihal pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (prosedur kerja dan kepuasan masyarakat terhadap program) serta membantu mengisi informasi pada papan-papan informasi program yang tersebar di berbagai titik di wilayah desa.

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, dalam hal ini di Desa Takkalasi, partisipasi masyarakat menunjukkan prosentase atau proporsi yang cukup memadai. Sebagai sebuah desa yang bercorak agraris, secara umum partisipan program adalah kaum perempuan karena memiliki waktu jauh lebih banyak di rumah dibandingkan dengan laki-laki yang banyak menghabiskan waktu di ladang atau kebun. Faktor alamiah ini bukan sebagai faktor tunggal yang memengaruhi tingginya keterlibatan perempuan dalam program. Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa kinerja sosialisasi telah berpena besar dalam meningkatkan kesadaran gender bagi perempuan untuk terlibat dalam program untuk mengawal dan memperjuangkan kebutuhan serta kepentingan kelompoknya. Informan menjelaskannya seperti berikut ini: “Di Desa Takkalasi ini partisipasi perempuan cukup tinggi. Ketertarikannya mendukung program patut diapresiasi karena mampu memberikan warna tersendiri dalam perjalanan program. Banyak pos atau wadah sebagai ruangnya untuk memberikan pengabdian sekaligus sebagai wadah perjuangan untuk memperjuangkan kebutuhan dan kepentingannya. Di Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), dari 9 anggotanya terdapat 5 perempuan, dan ketua dari lembaga ini adalah seorang perempuan (ibu rumah tangga) yang dipercaya masyarakat memimpin LKM dan telah berjalan 12 tahun kepemimpinannya. Selain LKM, semua unit kerja di bawah LKM (UPS, UPK, dan UPL) juga telah menjadi wadah bagi perempuan untuk berpartisipasi. Dalam konteks yang lebih luas, partisipasi perempuan memiliki variasi atau jenis yang beragam, dari sekedar ikut rapat hingga memberikan peran penting yang dibutuhkan masyarakat dan didukung oleh program”.

Partisipasi perempuan dalam program tidak semata-mata sebagai pemenuhan prasyarat, tetapi lebih dari itu, partisipasinya dimaksudkan untuk mencegah determinasi laki-laki secara berlebihan yang akan berdampak pada hilangnya representasi dan kepentingan perempuan dalam program. Penelitian Wijayanti (WIJAYANTI, 2018) juga mengungkapkan bahwa salah satu alasan mendasar pelibatan perempuan secara massif pada pelaksanaan program pembedayaan masyarakat, khususnya PNPM Mandiri Perkotaan adalah memberikan perimbangan antara posisi

laki-laki dan posisi perempuan dalam keikutsertaannya dalam program, selain itu juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesenjangan gender selama pelaksanaan program.

Kemudian pada aspek pemberdayaan ekonomi perempuan Salah satu strategi penting adalah memberdayakan perempuan secara ekonomi. Implementasi strategi ini dilakukan melalui pelatihan keterampilan, akses ke sumber daya finansial, pendampingan bisnis, dan akses ke pasar. Memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi membantu mengurangi kesenjangan gender dan mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan salah satu komponen mendasar dari upaya meningkatkan keberdayaan ekonomi perempuan, khususnya mereka yang berlatar belakang rentan dan miskin. Perhatian yang lebih serius kepada kelompok rentan dan miskin didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan sekaligus untuk mencegah makin meningkatnya jumlah populasi warga miskin (warmis) akibat dinamika perubahan sosial yang makin tidak menentu. Dalam kaitan ini, PNPM Mandiri Perkotaan memfasilitasi pembentukan kelompok produktif melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Jumlah anggota dalam KSM berbilang ganjil, yakni 5, 7, hingga 9 orang. Warga atau individu yang tergabung dalam satu KSM memiliki kriteria yang sama, antara lain; Penduduk miskin (pra sejahtera). Berdomisili di kelurahan tempat program diselenggarakan. Memiliki visi ekonomi yang sama, dan Memiliki embrio usaha dasar untuk dikembangkan. Fasilitator memberikan deskripsi menyangkut perihal ini sebagai berikut: “Salah satu misi program ini adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, khususnya perempuan yang memiliki kerentanan atau berlatar belakang miskin (pra sejahtera). Metode pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan cara berkelompok agar lebih efektif karena memberdayakan dengan metode kelompok sangat jauh lebih efektif ketimbang dengan intervensi individu. Itulah kita membentuk KSM”.

Dapat dipahami bahwa kebijakan program yang memberi prioritas terhadap perempuan miskin berhubungkait dengan kebijakan global *Millenium Development Goals (MDG's)* yang mengamanatkan pengurangan penduduk miskin dunia menjadi separuh dari jumlah yang ada pada setiap negara, dan diteruskannya kembali kebijakan itu melalui

Sustainable Development Goals (SDG's). Dalam upaya itu, PNPM Mandiri Perkotaan menjadi kontributor penting dan terdepan dalam menekan pertumbuhan populasi miskin secara nasional melalui berbagai komponen program yang mampu mencegah makin bertambahnya jumlah populasi warga miskin. Menyangkut jumlah anggota KSM yang harus ganjil, hal ini terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan dalam kelompok. Secara gamblang, fasilitator menjelaskan sebagai berikut: “Dalam KSM, kita mengenalkan dan mendorong proses demokrasi sebagai bagian dari peningkatan kapasitas (*capacity building*) personal perempuan. Dalam kelompok atau KSM, ada aturan main sendiri yang berfungsi mengikat semua anggota agar bertindak sesuai aturan yang dibuat bersama. KSM seringkali merumuskan kebijakan internal yang setiap anggota perlu membangun konsensus dan permufakatan, dan jika mufakat tidak tercapai, maka mekanisme voting ditempuh untuk pengambilan keputusan. Jadi itulah mengapa anggota KSM itu selalu berjumlah ganjil karena untuk kepentingan pembuatan keputusan dengan mekanisme voting”.

Hal yang menarik dalam konfigurasi keanggotaan setiap KSM ekonomi adalah keterlibatan warga non miskin yang secara fungsional memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha ekonomi yang dijalankan oleh setiap anggota KSM. Jumlah anggota non miskin dalam KSM secara umum berjumlah satu hingga dua orang. Keanggotaan warga non miskin dalam setiap KSM lebih berciri kerelawanan dan tidak sebagai pemanfaat primer bantuan dana program.

Keterlibatan warga non miskin (perempuan dan laki-laki) dalam kelompok-kelompok ekonomi sesungguhnya merupakan strategi program untuk memperluas akses sekaligus sebagai instrumen bagi warga untuk dapat berpartisipasi dalam program pemberdayaan. Tetapi, hal utama dari masuknya warga non miskin dalam KSM dimaksudkan untuk dapat membagi pengalaman, melakukan fungsi asistensi dan konsultasi agar kelompok-kelompok bisnis tersebut dapat tetap *survive* serta berdampak positif terhadap perbaikan kesejahteraan anggotanya. Dalam sesi wawancara yang berlangsung hangat dan bersahabat, fasilitator menjelaskannya sebagai berikut: “Bahwa pemberdayaan masyarakat selalu identik dengan partisipasi. Tidak sah sebuah program pemberdayaan

jika mengabaikan partisipasi masyarakat, karena paradigma baru dalam pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat adalah subyek pembangunan yang harus diberi peran secara luas. Keterlibatan banyak warga dalam KSM misalnya adalah sebagai upaya menjamin demokratisasi melalui keterlibatan yang setara dalam pemberdayaan masyarakat. Kita semua berharap keterlibatan warga non miskin dalam program akan mampu berdampak positif terhadap eksistensi dan kemajuan kelompok karena didukung oleh individu-individu yang secara personal memiliki nilai tambah bagi pengembangan kelompok”.

Untuk menggerakkan usaha dalam KSM, program memberikan fasilitas bantuan berupa dana sebesar Rp 500.000,- per anggota yang metode pengembaliannya bersifat tanggung renteng atau semua anggota kelompok berupaya menanggung pengembalian dana tersebut ke Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK sendiri merupakan unit finansial yang bertanggung jawab kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di Desa Takkalasi. Jumlah tersebut akan mengalami peningkatan di tahun-tahun sesudahnya jika kondisi KSM mencerminkan kemajuan dan keberhasilan usaha. Jumlah pinjaman akan meningkat menjadi 1.000.000, - hingga 2.500.000, - perorang yang didasarkan pada studi kelayakan atau observasi dari UPK dan LKM. Fasilitator menjelaskannya sebagai berikut: “Semua KSM yang kita anggap sudah dapat beroperasi akan diberikan dana yang bersifat pinjaman. Pengembalian pinjaman dimaksudkan agar dana tersebut dapat pula dinikmati oleh warga lain yang benar-benar membutuhkan. Sebenarnya jumlah kucuran dana pertama sangat kecil untuk dapat digunakan sebagai modal awal, tetapi program berpandangan lain, dana kecil itu lebih kepada stimulan untuk menggairahkan dan meningkatkan potensi KSM untuk bangkit dan maju. Istilahnya dana kecil itu sebagai mainan kelompok untuk membangun integrasi, komitmen, kepedulian dan belajar berusaha agar dapat lebih kompetitif”.

Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan atau karitas dari luar. Dalam perspektif ini, program tersebut diorientasikan untuk mencegah makin akutnya mentalitas tergantung (*dependent mentality*) masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Dalam wawancara di atas secara tegas menjelaskan bahwa dana

pinjaman yang diberikan program terhadap semua KSM adalah sebagai stimulan yang tidak diberikan secara permanen. Pinjaman tersebut harus dikembalikan untuk menjamin ketersediaan dana abadi agar dapat digulirkan kembali. Dengan demikian, maka pola pemanfaatan dana ekonomi pada PNPM Mandiri Perkotaan adalah bergulir dan bergilir.

Pengarusutamaan gender dalam semua program pemberdayaan, baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun oleh NGO/LSM menjadikan keterlibatan perempuan sebagai narasi utama. Sebagai komparasi, di PNPM Mandiri Perdesaan yang sebelumnya dikenal dengan nama Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), dibentuk kelompok-kelompok ekonomi produktif yang secara keseluruhannya beranggotakan perempuan dengan nama kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kebijakan ini merespon salah satu tujuan program, yakni memberikan akses dan ruang yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berpartisipasi selain dengan menjadi pemanfaat primer dari program pemberdayaan masyarakat.

Pada aspek yang terakhir ialah membangun kultur kepemimpinan perempuan Pada masyarakat yang bercorak patriarkhi, kepemimpinan perempuan masih merupakan sesuatu yang langka dan cenderung tabu. Tidak heran jika kepemimpinan publik masih dideterminasi oleh kaum laki-laki. Puncak hierarkhi politik masih menjadi milik laki-laki, sekaligus menegaskan masih kuatnya determinasi laki-laki dalam urusan politik. Fenomena ini membutuhkan evolusi dan restorasi struktur sosial dan politik yang memungkinkan perempuan memiliki akses dan hak yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi aktor penting dalam kehidupan politik di level komunitas. Hingga saat ini, masyarakat umum masih berpandangan bahwa kepemimpinan di semua sendi kehidupan, mulai dari keluarga hingga kepemimpinan publik di level tertinggi harus dipegang atau diduduki oleh laki-laki. Kristof dan WuDunn dalam Zinn (Zinn, 2011) menginstruksikan perlunya panggilan moral melalui konsep *Half the Sky*" sebagai panggilan untuk tindakan global untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan mengakhiri ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan.

Pemosisian laki-laki sebagai pemimpin diperkuat secara argumentatif berbasis teologis melalui teks-teks kitab suci. Simone de Beauvoir (De Beauvoir, 2023) mengeksplorasi berbagai aspek tentang bagaimana perempuan dianggap sebagai "seks sekunder" dalam budaya patriarki. Ia

menggambarkan bagaimana perempuan sering kali dianggap sebagai "lain" atau "yang lain" dalam hubungannya dengan laki-laki. Beauvoir mempertanyakan dan mengkritik berbagai konsep dan norma-norma yang telah diakui secara tradisional dalam masyarakat yang menghasilkan ketidaksetaraan gender. Kimmel (Kimmel, 2000) menegaskan bahwa sistem gender telah membuat disparitas yang tajam dan mengkonstruksi feminitas dan maskulinitas sebagai dualitas sub sistem yang tidak setara.

Dewasa ini, kepemimpinan publik di masyarakat mulai nampak bergeser sebagai akibat dari perubahan sosial dan budaya yang sangat dinamis. Laki-laki dan perempuan mulai mendapatkan kesempatan yang sama dan setara untuk menjadi pemimpin di sektor publik. Di kepemimpinan non formal, seperti organisasi masyarakat warga telah mulai adaptif terhadap kehadiran figur pemimpin perempuan. Fenomena ini telah menunjukkan keselarasan pada tujuan MDG's yang ke tiga, yakni mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tidak mudah memfasilitasi sekaligus memberikan suntikan moral terhadap perempuan untuk mengambil peran secara kualitatif dan penting di sektor publik, mengingat struktur sosial saat ini yang masih teguh memosisikan laki-laki sebagai entitas utama di semua bidang kehidupan. Pendekatan persuasif yang dilakukan fasilitator dalam proses fasilitasnya di tingkat warga, perlahan-lahan mampu mengubah pandangan kelompok perempuan melalui proses refleksi. Proses ini tampaknya mampu mengkonstruksi sebuah pandangan yang lebih egaliter dan maju sekaligus memberikan ruang bagi kelompok perempuan untuk mempresentasikan dirinya sebagai bagian yang sama kedudukannya dengan kaum laki-laki.

Pengarusutamaan gender merupakan gerakan dinamis yang secara kontributif memberikan dorongan dan dukungan bagi munculnya figur-figur pemimpin dari kalangan perempuan. PNPM Mandiri Perkotaan yang dalam implementasinya menjunjung tinggi prinsip inklusi, memfasilitasi dan mendorong terbangunnya kultur baru yang memungkinkan munculnya figur-figur perempuan ke permukaan menjadi pemimpin publik di tingkat organisasi masyarakat. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) beserta pembentukan unit-unit operasionalnya merupakan fasilitas program untuk mewadahi kiprah kepemimpinan perempuan. LKM merupakan organisasi masyarakat warga (OMW) yang proses pemilihan pengurusnya dilakukan secara demokratis, sementara kriteria figurnya didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan (jujur, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan peduli).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kultur kepemimpinan perempuan di Desa Takkalasi mulai terbangun yang ditandai dengan terpilihnya Marsinah sebagai Ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) selama 4 (empat) periode secara beruntun, yakni dari tahun 2004-2009,

2010-2015, 2016-2020, 2020-hingga sekarang. Marsinah adalah seorang ibu rumah tangga biasa namun dipercaya warga Desa Takkalasi mengendalikan LKM sebagai organisasi tertinggi milik warga yang berfokus untuk menanggulangi kemiskinan dan kondisi rentan lainnya. Dalam kesempatan wawancara dengannya perihal bagaimana dirinya terpilih, informan Marsinah menjelaskannya sebagai berikut: “Di tahun 2003 yang lalu PNPM Mandiri Perkotaan mulai masuk di Desa Takkalasi dengan seorang fasilitator. Program pemberdayaan ini lama sekali baru bisa cair anggarannya, tahapannya panjang. Salah satu tahapannya adalah ada namanya pembentukan LKM dan pengurusnya dipilih secara langsung, seperti pemilu, ada kertas suara dan ada calonnya. Di pemilihan basis atau tingkat lingkungan saya memiliki suara tertinggi, saat itu saya meraih suara 302, lalu masuk di putaran kedua atau tingkat desa. Di tingkat desa saya juga memilih suara terbanyak, yakni 31, maka saya resmi masuk anggota LKM, dan disepakati bahwa saya yang jadi ketua lembaga tersebut”.

Salah satu aspek paling esensial dari wawancara di atas adalah mekanisme pemilihan yang benar-benar demokratis. Corak patriarkhi tidak lantas menghegemoni pemilihan dengan mengedepankan kandidat laki-laki dan menghalangi keterpilihan perempuan, namun sebaliknya, dimana perempuan diberikan kesempatan dan dibentangkan karpet merah untuk menduduki posisi puncak pada organisasi tertinggi milik warga. Kesadaran gender tentu saja menjadi salah satu aspek mendasar dari keperpilihan Marsinah sebagai ketua, dan pada saat yang bersamaan, paradigma masyarakat tentang kepemimpinan perempuan mulai diterima secara meluas tanpa dipersoalkan.

Menurut Marsinah, dirinya dapat lebih mudah mengikuti proses dan mekanisme demokrasi karena di samping mendapat dukungan dari masyarakat (di lingkungan domisilinya dan tiga lingkungan lainnya), juga mendapatkan dukungan dari suaminya secara langsung. Bagaimana suaminya mendukung dirinya, diungkapkannya sebagai berikut: “Sewaktu nama saya dipilih warga di tingkat basis, saya sudah informasikan ke suami dan meminta tanggapannya tentang keputusan warga memilih saya. Pada prinsipnya suami tidak melarang dan juga tidak menyuruh, semuanya dikembalikan ke saya. Karena suami tidak melarang berarti boleh saya ikut kontestasi. Pertimbangan lain adalah saya menghormati pilihan warga apalagi saya mayoritas”.

Kriteria calon anggota LKM yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan telah mewujudkan menjadi instrumen dasar yang meneguhkan kesempatan kepada perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam kepemimpinan publik di tingkat desa. Perumusan kriteria calon disepakati

melalui berbagai tahapan diskusi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Subyek diskusi terkait dengan hal ini adalah menyangkut kepemimpinan, antara lain apa itu pemimpin, seperti apa pemimpin yang baik, dan bagaimana ciri-cirinya pemimpin yang baik itu. Selanjutnya ciri-ciri umum yang muncul dari semua tahapan diskusi secara lintas kalangan, selanjutnya diekstrak menjadi kriteria calon pemimpin yang disepakati pada rembug desa. Hal ini diungkapkan oleh fasilitator sebagai berikut: “Penentuan kriteria calon LKM dirumuskan secara berjenjang dan semua kalangan masyarakat diikutkan. Fasilitator memfasilitasi diskusi di banyak kelompok masyarakat, hal pokok yang dibahas adalah apa pemahaman warga tentang pemimpin dan bagaimana ciri pemimpin yang disebut baik itu. Setiap kelompok hampir memiliki gagasan tentang ciri pemimpin yang baik, misalnya jujur, tidak korupsi atau amanah, dan sebagainya. Ciri-ciri yang dirumuskan tersebut selanjutnya disahkan di rapat tingkat desa, lalu kemudian menjadi kriteria calon untuk memilih anggota LKM, dan unit-unit operasionalnya”.

Dari informasi yang diperoleh, kriteria calon anggota LKM tidak mengacu pada aspek gender, pendidikan, status sosial, dan atribut sosial lainnya. Kriteria yang disepakatinya sederhana namun esensial dan sangat mendasar. Mereka yang dipilih adalah mereka yang menurut warga memiliki kualitas kemanusiaan yang baik; dipercaya, jujur, dan peduli. Terkait ini, fasilitator menjelaskannya sebagai berikut: “Pemilihan anggota LKM terbilang unik, karena tidak boleh ada calon dan tidak boleh berkampanye. Dalam perspektif program, jika ada calon maka memungkinkan masuknya figur-figur yang mengedepankan kepentingannya. Dan mengapa tidak ada kampanye adalah karena warga saling kenal secara keseluruhannya sehingga tidak membutuhkan kampanye yang bermaksud mensosialisasikan calon. Sebelum pemilihan, panitia menyusun kriteria calon yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan, aspek pendidikan dan lainnya diabaikan. Yang terpenting adalah dia baik dari segi kepribadian menurut warga. Kalau dia baik maka akan baik pula kebijakan dan keputusan yang diambilnya”.

Prinsip demokrasi yang diperkenalkan dan dengan sendirinya dijadikan acuan dalam proses pemilihan anggota LKM, telah secara langung melapangkan jalan bagi munculnya figur-figur perempuan untuk mengisi posisi penting dan sentral di organisasi masyarakat warga. Kekakuan patriarkhi dan stereotype tentang perempuan sebagai entitas sosial yang menempati kelas di bawah laki-laki di masyarakat, sama sekali tidak tergambarkan pada masyarakat Desa Takkalasi. Penelitian mengonfirmasi bahwa masyarakat desa ini tampak makin inklusif dan menjunjung kesetaraan sehingga memudahkan perempuan untuk berkiprah di ranah publik. Sektor domestik dan sektor publik adalah dualitas wilayah yang sama pentingnya bagi perempuan di masyarakat Desa Takkalasi.

Data dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak saja Marsinah yang dapat menggeser dominasi laki-laki sebagai figur kunci dalam kepemimpinan publik, beberapa perempuan lainnya juga memiliki posisi yang juga cukup penting dalam organisasi LKM tersebut. Terdapat tiga perempuan lainnya yang ada dalam struktur kepengurusan LKM, namun mereka bertugas di unit-unit operasionalnya, seperti Unit Pengelola Keuangan (UPK) dengan posisi sebagai manager UPK, pembuku, dan penagih.

Realitas ini memberikan indikasi bahwa terjadi perubahan dan pergeseran pemosisian perempuan di masyarakat yang dibarengi dengan paradigma masyarakat yang makin terbuka terhadap perubahan. Determinasi laki-laki dalam kepemimpinan publik secara perlahan-lahan mengalami koreksi. Misi pengarusutamaan gender pada implementasi program PNPM Mandiri Perkotaan yang dibarengi dengan penyiapan instrumen atau wadah untuk perempuan berkiprah, telah secara nyata mampu memfasilitasi bagi munculnya perempuan menjadi pemimpin dalam Organisasi Masyarakat Warga (OMW).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka disimpulkan sebagai berikut Strategi pengarusutamaan gender pada implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Desa Takkalasi adalah melalui sejumlah kegiatan yang terencana dan sistematis yang difasilitasi oleh fasilitator atau pendamping masyarakat bersama dengan pemerintah daerah. Sejumlah strategi tersebut antara lain; a) membangun kesadaran gender. Langkah ini merupakan tahapan inisial melalui gerakan sosialisasi massif dan dengan intensitas yang tinggi. Kesadaran gender dibangun melalui advokasi dan edukasi untuk terlibat dalam program dengan tanpa diskriminasi dan determinasi jenis kelamin tertentu terhadap jenis kelamin lainnya, b) menyelenggarakan pelatihan masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) agar masyarakat dapat memberikan peran berdasarkan kompetensinya, c) menjamin akses dan ruang untuk berpartisipasi. Strategi ini didasarkan pada asumsi dasar bahwa program adalah untuk semua. Laki-laki dan perempuan diberikan jaminan yang setara dan setaraf untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan program, d) pemberdayaan ekonomi perempuan. Strategi ini dimaksudkan untuk mendorong keberdayaan ekonomi perempuan dengan memanfaatkan anggaran program yang diberikan secara berkelompok, e) membangun kultur kepemimpinan perempuan. Strategi ini diorientasikan bagi munculnya figur-figur perempuan untuk dapat berpartisipasi dan berkompetisi untuk

menduduki posisi puncak dalam organisasi masyarakat warga yang pembentukannya difasilitasi oleh program.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. (1987). *Pembangunan desa mulai dari belakang*. Jakarta: Lp3es.
- De Beauvoir, S. (2023). The second sex. In *Social Theory Re-Wired* (pp. 346–354). Routledge.
- Fatmawati, F. (2022). Penguatan Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Berbasis Masjid di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. *ISTIQRRA*, 10(1), 1–15.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24239/ist.v9i1.920>
- Ishom, M. (2018). *Tiga Makna Hadits ‘Kemiskinan Dekat kepada Kekufuran.’* On-Line), Tersedia di: [https://islam.nu.or.id/post/read/81566/tiga](https://islam.nu.or.id/post/read/81566/tiga....)
- Isma, N. A. (2022). DAKWAH DALAM MEMBINA MASYARAKAT PESISIR KELURAHAN TALAKA KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP. *ISTIQRRA*, Vol. 10 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022, 241–258. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/ist/article/view/1747/927>
- Kimmel, M. S. (2000). *The gendered society*. Oxford University Press, USA.
- Mahendra, B. P. (2017). Analisis Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Pnpm Mp) Terhadap Produktifitas Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat. *International Journal of Social Science and Business*, 1(1), 1.
<https://doi.org/10.23887/ijssb.v1i1.10165>
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Mosse, J. C. (2002). *Gender dan pembangunan*.
- Muttaqin, A. (2010). Pengarusutamaan gender dalam penanggulangan kemiskinan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 5(1), 88–102.
- Nugroho, H. (2001). Negara, pasar, dan keadilan sosial. (No Title).
- Safa, H. I. (2007). Women, Development, and the UN: A Sixty-Year Quest for Equality and Justice. *Feminist Economics*, 13(1), 141–146. <https://doi.org/10.1080/13545700601075211>
- Safei, A. A., Ono, A., & Nurhayati, E. (2020). *Pengembangan Masyarakat Perspektif Islam dan Barat*. Simbiosis Rekatama Media.
- Sobur, A. (2017). *Semiotika komunikasi*. Remaja Karya.
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan upaya mewujudkannya dalam perspektif masyarakat lokal*. Pustaka Pelajar.
- WIJAYANTI, D. K. (2018). *Pengarusutamaan Gender Dalam Program Pemberdayaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Mino Ngudi Lestari di Dusun Nayan, Maguwoharjo, Depok, Sleman*. Universitas Gadjah Mada.
- Zinn, T. E. (2011). Half the Sky: Turning Oppression into Opportunity for Women Worldwide. *Psychology of Women Quarterly*, 35(2), 337–338.
<https://doi.org/10.1177/0361684311401819>